

Pers Mahasiswa dalam Benturan Neoliberalisme

Oleh : Ahmad Fahmi Ash Shiddiq*

Abstrak

Neoliberalisme menjadi besar dan menemukan momentumnya di tengah derasnya arus globalisasi abad ke-21. Dengan semangat liberalisme klasik, tetapi tampilan yang lebih futuristik dan menarik, membuatnya mampu merasuk dalam segala aspek kehidupan, tak terkecuali media dan informasi. Pelaku pers (jurnalis) mendapat tantangan yang besar, bukan lagi soal kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi publik, tetapi tentang idealisme, semangat membela danewartakan kebenaran, juga tantangan dari pers era citizen journalism (jurnalisme warga). Begitu pula pers mahasiswa, jurnalis-jurnalis kampus menghadapi tantangan dari maraknya arus neoliberalisme. Dengan semangat anak muda (mahasiswa), Pers Mahasiswa sangat dinantikan kiprah dan goresan emasnya di tengah lesunya gerakan mahasiswa dan derasnya arus neoliberalisme di Indonesia yang juga merasukpada sistem Pendidikan Tinggi. Idealisme dan independensi Pers Mahasiswa mendapat benturan hebat dari neoliberalisme.

Kata Kunci: *Pers Mahasiswa, Neoliberalisme, Idealisme.*

**Penulis adalah santri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Walisongo yang lahir dan besar dari Rayon Abdurrahman Wahid. Sekarang masih aktif sebagai mahasiswa tingkat akhir di FITK UIN Walisongo dan diberi amanah sebagai Pimpinan Umum LPM Edukasi FITK UIN Walisongo periode 2014-2015 dan Sekjen PPMI Kota Semarang periode 2015-2016. Penulis bisa dihubungi via surel elmuafa@gmail.com*

Pendahuluan

Membaca sejarah gerakan Pers Mahasiswa tidak akan lepas dari sejarah panjang perjuangan anak muda (mahasiswa) dalam semangat persatuan yang mendorong kemerdekaan Republik Indonesia. Pers Mahasiswa pada masanya dulu menjadi corong terdepan dan paling lantang dalam menyuarakan kebenaran, menjadi alat propaganda dan penyulut semangat rakyat yang paling efektif dalam mengkritisi dan menolak penjajahan yang dilakukan kaum imperialis. Dan terbukti, para penjajah menjadi gentar, takut dan reaksioner. Para aktifis pers ditangkap dan diasingkan, tetapi ide dan gagasan mereka tak pernah padam, dalam jeruji besi tetap menghasilkan karya. Tetapi itu cerita terdahulu, yang hanya akan menjadi cerita jika insan pers mahasiswa tidak bisa meneruskan semangat dan perjuangan para *founding fathers* republik ini.

Membincang Pers Mahasiswa sangat menarik, karena menggabungkan dua entitas yang mulia, Pers dan Mahasiswa. Kata mulia di sini sangat tepat, karena keduanya sama-sama berjuang atas nama kebenaran dan menyuarakan kebebasan berpendapat. Pers mahasiswa juga membawa spirit intelektualitas (kritis), kemanusiaan (keberpihakan pada moral dan etika), kerakyatan (keberpihakan dan kepedulian pada rakyat kelas bawah), kebangsaan (demokratisasi dan kemartabatan negeri), dan pers mahasiswa yang independen.¹ Namun, keduanya sekarang sedang mendapat tantangan dari yang namanya neoliberalisme.

Gagasan pokok neoliberalisme dapat dipahami sebagai penyempurnaan ide dasar dari liberalisme klasik, yaitu liberalisme sebagai sistem atau tatanan ekonomi yang berpijak pada, (1) pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar, (2) diakuinya kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi, dan (3) pembentukan harga barang-barang melalui mekanisme pasar yang sepenuhnya bebas. Kemudian konsep neoliberalisme dikembangkan oleh Alexander Rustow dan disempurnakan oleh para ekonom madzhab Chicago dan madzhab Freiburger. Hal mendasar yang membedakan neoliberalisme dengan liberalisme adalah pada ide tentang pembentukan harga pasar yang ternyata tidak bersifat alami, melainkan memerlukan

¹ Fatoni, Moh, dkk. *Menapak Jejak Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia*, (PT. Komodo Books: 2012), hlm. V.

campur tangan negara melalui penerbitan peraturan perundang-undangan.² Undang-undang tersebut yang nantinya akan menolong dan memudahkan para pemilik modal dalam menjalankan usahanya, tidak harus berbelit-belit oleh faktor kelembagaan.

Dan ternyata, neoliberalisme tidak melulu soal ekonomi. Puji Rianto dalam risetnya telah mengemukakan bahwa dalam tatanan neoliberal, media dianggap sebagai institusi bisnis dan produk media dianggap mempunyai nilai ekonomi. Maka munculah fenomena *market-driven journalism*, dimana produk jurnalistik lebih diorientasikan untuk melayani pasar melalui segmentasi dan targenting dibandingkan dengan melayani warga negara secara keseluruhan.³ Sehingga akan tercipta pola hubungan produsen-konsumen antara pemilik media dengan masyarakat yang tentunya akan mempertimbangkan untung dan rugi.

Masalah tersebut, sebenarnya juga tengah dialami oleh kawan-kawan persma. Lembaga pers yang dikelola oleh mahasiswa, kaum intelektual yang dikenal dengan idealismenya juga mulai kehilangan arah gerakannya. Gamang memilih antara mempertahankan idealisme persma atau mengikuti media *mainstream* yang telah masuk dalam sistem *market-driven journalism*. Memberikan informasi yang diinginkan masyarakat atau yang dibutuhkan masyarakat.

Semangat neoliberalisme juga sudah masuk ke kampus melalui Undang-undang Pendidikan Tinggi (UU PT). Adanya undang-undang tersebut secara tidak langsung telah menjadikan kampus sebagai 'perusahaan' yang akan dikelola oleh para 'pejabat' kampus. Kebebasan menerapkan 'harga' dan berkurangnya kontribusi negara menjadi dalil paling terang adanya liberalisasi pendidikan tinggi. Hal tersebut secara tidak langsung akan berdampak kepada mahasiswa pegiat pers kampus. Belum lagi mereka dihadapkan dengan permasalahan internal, yaitu sumber daya manusia dan keuangan demi berlangsungnya roda organisasi dan penerbitan.

Jika dahulu persma dijadikan sebagai alat perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia, sekarang ini persma mendapat tantangan dari bangsa sendiri yang membawa neoliberalisme ke Indonesia. Melihat realita semacam itu, apa yang

² Rizky, Awalil dan Nasyith Majidi, *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia*, (E Publishing Company: 2008), hlm. 231

³ Rianto, Puji, *Jurnalisme dalam Tatanan Neoliberal dan Krisis Demokrasi* dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9, Nomor 1, Juli 2005, hlm 133-130.

seharusnya kawan-kawan persma lakukan? Semua itu akan coba penulis urai dalam tulisan ini.

Pers Mahasiswa Indonesia dalam Bingkai Sejarah

Sejarah bangsa ini mencatat perjalanan Pers Mahasiswa yang membanggakan dan mengharumkan. Pers Mahasiswa mampu menjadi sebuah media yang berpengaruh dalam menuangkan gagasan, propaganda serta cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kelahiran majalah Indonesia Merdeka yang diterbitkan oleh organisasi *Perhimpunan Indonesia* (PI) pada tahun 1924 di Belanda juga *Soeara Indonesia Moeda* pada tahun 1928 yang terbit pada momen Sumpah Pemuda, keduanya turut memberikan suntikan semangat bagi terwujudnya cita-cita kemerdekaan yang terealisasi pada 17 Agustus 1945.⁴

Jauh sebelum itu, pada tahun 1908 Hindia Poetra diterbitkan oleh *Indische Vereeniging* (mahasiswa Indonesia di Belanda) yang kemudian pada tahun 1922 berubah nama menjadi *Indonesische Vereeniging*, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia satu tahun setelahnya dan berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia di tahun 1925.⁵

Selanjutnya berturut-turut di tahun 1914 *Jong Java* diterbitkan oleh pelajar dan mahasiswa. *Ganeca* diterbitkan oleh organisasi mahasiswa BSC atau CSB (1923). *Oesaha Pemoeda* diterbitkan oleh pelajar dan mahasiswa Indonesia di Kairo Mesir (1930) dan *Jaar Boek* diterbitkan oleh THS (sekarang ITB) pada kurun waktu 1930-1941.⁶

Selain aktivitas menulis yang dilakukan oleh lembaga pers, secara individu beberapa anak bangsa juga melakukan perlawanan melalui tulisan. Seperti Soewardi Soerjaningrat lewat tulisannya yang berjudul “*Als ik eens Nederlander Was*” (Seandainya Aku seorang Belanda) pada koran *De Ekspress* yang diterbitkan tanggal 3 Juni 1913. Soewardi atau kita kenal dengan Ki Hadjar Dewantara, yang belum genap 25 tahun menghabisi dan menelanjangi Belanda dengan kritikan tajam. Soewardi

⁴Asih, Kalis Mardi, *Merekonstruksi Idealisme Pers Mahasiswa* dalam kompasiana.com. Diakses 21 Juli 2015.

⁵ Fatoni, Moh, dkk. *Menapak Jejak Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia*, (PT. Komodo Books: 2012), hlm. 199.

⁶ Fatoni, Moh, dkk. *Menapak Jejak Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia*, hlm. 199.

Soerjaningrat muda kala itu menuliskan sebuah propaganda untuk kaum bumiputra agar *melek* terhadap kebiadaban Belanda menjajah bumi Hindia. Soewardi mengkritik pemerintahan Belanda yang akan merayakan hari kemerdekaannya yang genap 100 tahun. Soewardi menulis tidak sepatutnya Belanda merayakan pesta kemerdekaan, sedangkan kala itu Belanda merampas kemerdekaan Hindia. Selain itu, Belanda juga menarik uang rampasan dari kaum Bumiputra, untuk merayakan pesta kemerdekaan Belanda.

Belanda benar-benar marah dengan kritikan Soewardi. Disamping tulisan itu telah mempermalukan orang Belanda, banyak kaum Bumiputra yang melakukan gerakan untuk menentang Belanda. Imbasnya, *De Ekspress* dibredel oleh pemerintahan Belanda. Soewardi yang belum lama menikahi seorang gadis Hindia R.A. Sartinah pada tahun 1914, harus dibuang dan terpaksa berbulan madu dalam pengasingan.

Di masa-masa pra dan pasca kemerdekaan, pers mahasiswa masih berjuang sendiri-sendiri. Menyuarakan kebenaran dan Menjadi kontrol terhadap kekuasaan yang berkuasa. Sebelum akhirnya pada 8 Agustus 1955 diselenggarakan Konferensi Pers Mahasiswa Indonesia I di Kaliurang yang menghasilkan SPMI (Serikat Pers Mahasiswa Indonesia yang diketuai oleh T Yacob dan IWMI (Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia) yang dikomandoi oleh Nugroho Notosusanto.⁷ Mulai dari sini, kesadaran untuk berkumpul dan mengonsolidir antar anggota persma berkembang.

Semangat Bergerak Bersama

Sepanjang perjalanan republik ini, hanya ada dua wadah organisasi tingkat nasional yang mampu bertahan lama. Yang pertama adalah IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia) yang secara formal mampu bertahan selama 24 tahun (1958-1982) dan PPMI (Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia) yang sampai sekarang menginjak 23 tahun (1992-2015). Keduanya memiliki kesamaan dalam hal keanggotaan, bukan perorangan tetapi lembaga: Lembaga Pers Mahasiswa.

IWMI (Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia) yang anggotanya terdiri dari individu pegiat pers mahasiswa dan SPMI(Serikat Pers Mahasiswa Indonesia) yang keanggotaannya bersifat kelembagaan, dinilai tidak banyak perbedaan dan kegiatannya

⁷ Fatoni, Moh, dkk. *Menapak Jejak Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia*, hlm. 199.

sulit dipisahkan. Akhirnya pada Konferensi II Pers Mahasiswa (16-19 Juli 1958) meleburkan diri menjadi IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia). Dari sini lah perjalanan panjang organisasi persma skala nasional dimulai.

Dalam perjalanannya, IPMI tidak selalu lurus dan baik-baik saja, ada riak yang merintang semangat kolektif perjuangannya. IPMI memiliki dinamika yang cukup rumit dan kompleks terkait situasi nasional saat itu. Terhitung beberapa kali IPMI mengubah haluan organisasinya, antara memilih aktif dalam politik praktis dan independen.⁸

Pada masa demokrasi terpimpin era presiden Soekarno, IPMI memilih sikap independen. Bahkan IPMI dicap anak Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Masyumi karena tidak mencantumkan Manipol Usdek dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Berbeda setahun kemudian, berdasar keputusan musyawarah nasional di Bandung (25-30 September 1966) IPMI melebur dalam aktifitas politik melawan otoritarianisme Demokrasi Terpimpin dengan menjadi Biro Penerangan Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI). Pada masa ini 1966-1968 pengurus IPMI di daerah menerbitkan media.

Kemudian memasuki era orde baru, IPMI kembali menyatakan sikap independen. Nono Anwar Makarim, selaku Pimpinan Pusat IPMI (hasil Kongres Luar Biasa 1969) berpendapat perubahan mesti dimulai dari luar birokrasi sebagai kekuatan pengontrol supaya mampu mengimbangi opini publik. Hingga sampai pada tahun 1982 IPMI secara drastis mengalami kevakuman. Situasi ini disebabkan beberapa alasan, diantaranya adanya kebijakan NKK/BKK yang mengajak mahasiswa *back to campus*, kebijakan penerbitan khusus dan tindakan represif pemerintah melalui state apparatusnya.⁹

Namun begitu, segala usaha “pencegahan” yang dilakukan pemerintah tidak menyurutkan semangat aktivis pers mahasiswa, bahkan beberapa pers mahasiswa tumbuh subur di kampus-kampus. Perjuangan dimulai dari meja redaksi bergeser ke pelatihan, seminar, forum diskusi sampai ke mimbar bebas meneriakkan perlawanan. *Setting* politik mempengaruhi format gerakan persma.¹⁰

⁸ Fatoni, Moh, dkk. *Menapak Jejak Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia*, hlm. 2.

⁹ Tim Litbang PPMI 2010, *Catatan-catatan yang Belum Usai*, hlm. 27

¹⁰ Tim Litbang PPMI 2010, *Catatan-catatan yang Belum Usai*, hlm. 27-28.

Di masa-masa ini, persma tidak bisa lepas dari gerakan mahasiswa. Keduanya bersama-sama menjalankan tugas sebagai *agent of social control*. Meskipun pemerintah terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung berimbas terhadap gerakan mahasiswa. Dikeluarkannya UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan SK Dirjen Dikti No. 849/D/T/1989 tentang penerbitan yang cenderung membatasi ruang gerak pers mahasiswa, tampaknya tidak terlalu banyak berpengaruh. Aktivis pers mahasiswa tidak hanya menyelenggarakan agenda jurnalistik tetapi juga gerakan parlemen jalanan.¹¹

Kegelisahan pers mahasiswa juga diisi dengan gerakan-gerakan solidaritas. Sayangnya hanya sebagian kecil gerakan pers mahasiswa yang tercatat dalam teks-teks sejarah gerakan. Aktivis pers mahasiswa mempunyai keinginan untuk berorganisasi dan terus bergerak. Ketika IPMI dianggap kurang efektif dan tidak mampu lagi menjalankan roda organisasi, maka keinginan membentuk wadah baru kian menguat.¹²

Puncaknya pada 15 Oktober 1992 di Malang, 72 orang dari `37 PTN dan PTS se-Indonesia menyepakati dan mendeklarasikan adanya wadah baru untuk persma se-Indonesia dengan nama Perhimpunan Penerbitan Mahasiswa Indonesia (PPMI). Kata ‘penerbitan’ sebagai ganti ‘pers’ digunakan semata sikap toleransi/kompromi dari kawan-kawan aktifis persma terhadap Peraturan Menteri Penerangan No. 1 Tahun 1975 yang menggolongkan pers mahasiswa ke dalam kategori penerbitan khusus.¹³

Dengan adanya wadah baru ini (PPMI) muncul semangat solidaritas untuk melakukan advokasi terhadap beberapa kasus pemberedelan yang terjadi di beberapa persma. Di antaranya *Majalah Vokal* IKIP PGRI Semarang yang dicekal terbit, *Tabloid Dialogue* terbitan Senat FISIP Unair Surabaya diberedel dan penanggung jawabnya diskorsing dan *Majalah Arena* IAIN Sunan Kalijaga Kogjakarta.

Pers Mahasiswa sebagai Alat Perlawanan

Seperti yang sudah dituliskan di atas, hanya sebagian kecil gerakan pers mahasiswa yang tercatat dalam teks-teks sejarah gerakan. Padahal kawan-kawan aktivis persma selalu hadir dalam setiap momen bersejarah bangsa Indonesia. Berbagai tulisan kritis dan penerbitan alternatif sepanjang sejarah konsolidasi demokrasi dan wacana

¹¹ Fatoni, Moh, dkk. *Menapak Jejak Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia*, hlm. 17.

¹² Fatoni, Moh, dkk. *Menapak Jejak Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia*, hlm. 18.

¹³ Fatoni, Moh, dkk. *Menapak Jejak Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia*, hlm. 50

kebangsaan, diwarnai dan dipimpin organisasi pers mahasiswa. Bahkan di setiap daerah memiliki basis kampus dan tradisi intelektual, maka beragam bentuk sekaligus kisah perlawanan pers mahasiswa atas rezim represif dan sentralistik.

Tapi memang sifat dan sikap persma yang cenderung tidak ingin populis sebagaimana organisasi dan gerakan mahasiswa yang lainnya: menggerakkan massa turun ke jalan sambil mengibarkan bendera dan atribut organisasi. Para aktivis persma lebih lantang menyuarakan gagasan dan idenya melalui goresan-goresan tinta. Jika kita telaah, kontribusi pers mahasiswa bisa dikelompokkan menjadi empat fase, pra kemerdekaan, orde lama, orde baru dan reformasi.

Pertama, era pra kemerdekaan. Sejarah mencatat bahwa persma tidak pernah absen dalam memberikan kontribusi atas setiap perubahan yang terjadi. Sejak zaman penjajahan kolonial, persma mendorong adanya kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kedua, memasuki era kemerdekaan, persma ikut andil dalam roda kenegaraan. Sesekali bersikap kompromistis, tetapi lebih banyak independen, berada di luar sistem, menjadi pengawas dan kontrol pemerintahan yang berkuasa.

Ketiga, di zaman orde baru, meskipun dengan tekanan yang bertubi-tubi dari pemerintah melalui aturan-aturannya, persma tetap tidak gentar. Sikap represif pemerintah justru mendorong persma menjadi media alternatif masyarakat. Ketika media *mainstream* telah diawasi dan disetir pemerintah, persma hadir dengan nuansa dan sudut pandang yang berbeda. Tetap menyuarakan kebenaran dan berpihak kepada *wong cilik*

Keempat, era keterbukaan informasi seperti sekarang ini persma hadir sebagai media penyeimbang dari beberapa media *mainstream*. Terakhir pemberitaan terhadap kasus yang menimpa Angeline dan kerusuhan di Tolikara, persma menghimbau dan mengajak para jurnalis profesional untuk tetap mempertahankan kode etik jurnalistik. Mengutamakan verifikasi data dibanding mengumbar berita yang sekadar sensasi.

Diskursus Neoliberalisme

Setelah melakukan petualangan literasi historis Pers Mahasiswa, penting bagi kita untuk mengkaji secara teoretis musuh yang sedang mengancam idealitas Pers Mahasiswa, yakni Neoliberalisme. Pada dasarnya, pandangan-pandangan neoliberal bersandar pada gagasan liberalisme klasik seperti Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823). Adam Smith misalnya mengatakan bahwa bila dalam transaksi

ekonomi dengan orang lain, tiap-tiap individu bebas mengejar kepentingannya sendiri maka bukan hanya dia yang beruntung, tetapi juga seluruh masyarakat. Sebaliknya, jika pemerintah turut mengatur dan mencampuri transaksi tersebut, maka kesejahteraan setiap orang akan berkurang.¹⁴

Neoliberalisme sebagai gagasan sudah dikenal sejak tahun 1930-an. Sebagai bagian dari perkembangan pemikiran ekonomi kapitalisme, konsep ini adalah kelanjutan dari konsep liberalisme. Awalil Rizky dan Nasyith Majidi mendefinisikan kapitalisme sebagai formasi sosial. Sedangkan liberalisme klasik, neoliberalisme, Keynesian dan sebagainya adalah konsep tentang mekanisme dalam formasi tersebut, khususnya yang berkenaan dengan pokok-pokok kebijakan ekonomi.¹⁵

Juga dijelaskan oleh Awalil dan Nasyith (2008; 231), perbedaan diantara bentuk-bentuk kapitalisme, liberalisme dan neoliberalisme antara lain adalah: tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh negara; seberapa besar 'porsi' bagi mekanisme pasar; seberapa jauh kebebasan individu untuk kepemilikan dan persaingan perlu dibatasi.

Sedangkan kesamaannya adalah pada kesepakatan tentang kapitalisme sebagai formasi sosial; pengakuan akan kepemilikan pribadi dan kebebasan berusaha; serta mekanisme pasar sebagai ciri utama memecahkan masalah ekonomi.

Berbeda Robert McChesney yang menganggap neoliberalisme berkenaan dengan suatu keyakinan yang sangat kuat menyangkut kemampuan pasar untuk menggunakan teknologi-teknologi baru untuk memecahkan persoalan-persoalan sosial dengan hasil lebih baik dibandingkan dengan alternatif yang lain.¹⁶ Dalam hal ini neoliberalisme erat kaitannya dengan globalisasi dan semakin berkembang pesatnya teknologi informasi. Bisa dilihat dari keseharian masyarakat yang tidak bisa terlepas sedetikpun dari teknologi, mulai dari aktivitas memasak, bertani, berkebun sampai pada alat telekomunikasi.

Sampai pada titik itu, neoliberalisme telah membawa dampak besar pada tatanan industri pers dan media. Neoliberalisme telah membentuk media sebagai institusi bisnis dan produknya dianggap mempunyai nilai ekonomi. *Market-driven journalism* semakin mengakar dan menjumpai setiap perusahaan media di Indonesia. Produk-produk

¹⁴Rianto, Puji, *Jurnalisme dalam Tatanan Neoliberal dan Krisis Demokrasi*, hlm 115.

¹⁵Rizky, Awalil dan Nasyith Majidi, *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia*, hlm. 231

¹⁶Rianto, Puji, *Jurnalisme dalam Tatanan Neoliberal dan Krisis Demokrasi*, hlm 116.

jurnalistik lebih diorientasikan untuk melayani pasar melalui segmentasi dan targetting dibandingkan dengan melayani warga negara secara keseluruhan. Sudah banyak korporasi media yang dimiliki oleh orang-orang tertentu yang nota bene memiliki kepentingan terhadap kekuasaan.

Pers Mahasiswa dalam Benturan Neoliberalisme

Adanya pasar bebas dalam bentuk Masyarakat Ekonomi Asean, menandakan era baru neoliberalisme. Perlu dicermati bahwa, neoliberalisme sebagai sebuah formasi sosial, sejatinya bukan hanya proses ekonomi, tetapi juga proses kultural. Jika proses ekonomi bermain di tingkat makro, maka proses kultural secara mendalam masuk ke dalam kesadaran tiap-tiap individu dalam kehidupan sehari-hari, dan mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan merasa. Itu yang terjadi pula dalam kehidupan mahasiswa sekarang.

Mahasiswa, juga termasuk di dalamnya jurnalis kampus oleh pelaku neoliberalisme ditundukan melalui cara: dikurung dalam kampus, dan diracuni dengan kesenangan semu. Ini hal pertama dari agenda neoliberalisme dalam pendidikan tinggi.

Mencoba membentuk karakter mahasiswa yang jauh dari kodratnya sebagai insan intelektual tinggi. Mahasiswa dibuat hanya sibuk dengan kegiatan akademik dan dijauhkan dari relitas sosial. Kurikulum dirancang sesuai kebutuhan pasar yang berorientasi untuk menghasilkan mahasiswa-mahasiswa siap pakai dalam dunia kerja. Dalam kondisi seperti itu mahasiswa kehilangan idealisme, bahkan sulit membayangkan diri sebagai kaum intelektual, pembela rakyat, atau aktivis perubahan.

Keadaan seperti itu diperparah lagi dengan pencitraan buruk mahasiswa yang dilakukan oleh media, terutama televisi. Banyak diungkap aktivitas sebagian mahasiswa yang hanya sibuk berurusan dengan masalah percintaan dan kehidupan kaum hedonis dalam kisah sinetron atau *reality show*. Oleh pelaku kapitalisme, kampus digambarkan sebagai tempat untuk aktivitas kisah cinta sempit yang bernama pacaran dengan banyak menonjolkan fisik dan materi. Sengaja menghilangkan kesan bahwa mahasiswa adalah kaum intelektual yang selalu dekat dengan rakyat dan kampus adalah tempat menempa ilmu dan kemampuan diri.

Selanjutnya, neoliberalisme juga masuk pada sistem pendidikan nasional, khususnya pada pendidikan tinggi yang merupakan habitus pegiat pers mahasiswa. Adanya UU Pendidikan Tinggi secara tidak langsung akan berpengaruh kepada aktivitas dan gerak persma. Adanya wacana batas studi maksimal lima tahun saja sudah mengubah orientasi mahasiswa untuk cepat lulus dan mengutamakan akademik daripada pengembangan skill dalam organisasi.

Lahirnya Undang-undang Pendidikan Tinggi yang membawa semangat liberalisasi pendidikan - salah satu agenda neoliberalisme, diakui atau tidak telah mengancam eksistensi dan idealisme pers mahasiswa. UU Pendidikan Tinggi, pada dasarnya, adalah satu paket dengan skema liberalisasi pendidikan yang berlangsung secara global. Setidaknya, ada tiga alasan yang bisa menguatkan hal itu. *Pertama*, penetrasi kapitalisme global, yang tercermin dari kooptasi wacana-wacana neoliberal tentang pendidikan tinggi dan tertulis pada pasal-pasal krusial mengenai relasi institusi pendidikan dan dunia usaha, transformasi PTN ke Badan Hukum, otonomi (non-akademik), hingga internasionalisasi.

Kedua, posisi PTN sebagai ‘Badan Hukum’ yang mengisyaratkan adanya otonomi non-akademik serta kebebasan PTN untuk menentukan ‘tarif’ sendiri. Hal ini dipertegas oleh PP 58/2013 yang memberi dasar operasional bagi penentuan PTN Badan Hukum. *Ketiga*, diskursus yang melepaskan ‘negara’ dari tanggung jawabnya untuk membiayai pendidikan. Dengan format badan hukum, disertai oleh klausul-klausul ‘kabur’ tentang peran negara, ‘negara’ tidak lagi punya tanggung jawab besar untuk memastikan biaya kuliah tidak mahal –semua sudah diatur dengan dalih ‘indeks kemahalan wilayah’.¹⁷

Kaitannya dengan pers mahasiswa sekarang ini, dua agenda neoliberalisme, yaitu pembentukan karakter mahasiswa yang jauh dari nilai akademis dan Undang-undang Pendidikan Tinggi jelas sangat berpengaruh terhadap proses kaderisasi dalam tubuh persma. Sehingga persma kekurangan sumber daya manusia berkualitas, yang kritis dan responsif terhadap realita sosial.

¹⁷Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah, *Gerakan Mahasiswa dan Politik Liberalisasi Pendidikan Pasca 2014* dalam Jurnal Online Indoprogres. Diakses 21 Juli 2015.

Adanya persoalan semacam itu berdampak pada *ghiroh* aktivitas dan gerakan persma. Alih-alih menjadi media alternatif ataupun pembeda dengan media nasional, persma justru disibukkan dengan urusan dapur masing-masing. Para jurnalis kampus menjadi lupa akan tugas mulianya sebagai pewarta kebenaran, menjadi penyambung lidah rakyat.

Khittah dan Hakikat Persma

Jika pada era pra kemerdekaan sampai orde baru pers mahasiswa bersuara lantang, bersikap tegas dan *kekeuh* menjaga idealismenya, yang dengan itu mampu melawan kolonialisme, imperialisme dan menjadi kontrol terhadap pemerintahan. Sejatinya, sekarang ini pun, pers mahasiswa harus lebih lantang mengkritik dan melawan terhadap penjajahan baru bernama neoliberalisme.

Hal itu tidak mustahil terjadi karena tantangan Pers mahasiswa sekarang ini tidak seberat ketika zaman kemerdekaan yang berjuang melawan kolonialisme dan imperialisme. Tidak seberat zaman Soeharto yang kebebasan berpendapat dibungkam, mahasiswa dikucilkan dan dikembalikan ke kampus dengan kebijakan *back to campus* (NKK/BKK). Pers Mahasiswa sekarang ini hanya perlu berjuang dengan kebenaran dan melihat dengan hati nurani terhadap segala realita yang terjadi.

Hal itu bisa dicapai dengan berbagai macam cara. *Pertama*, sebagai seorang mahasiswa, jurnalis kampus harus dibangun kesadaran kritisnya. Bisa menggunakan psikologi kritis Erich Fromm yang berintikan metode “pemahaman diri sendiri”. Jurnalis kampus harus faham dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang, Siapakah kita? Apa yang menjadi keinginan terdalam kita? Siapakah mahasiswa itu? Apa yang menjadi tanggung jawabnya (baik individu maupun sosial)?

Harapannya dengan memahami diri sendiri, mahasiswa akan mampu memerdekakan diri, keluar dari citra palsu yang dibangun tentang dirinya. Kemudian bertransformasi menjadi perjuangan untuk menciptakan kesadaran, struktur dan sistem yang kondusif bagi kemerdekaan setiap individu, melenyapkan segala bentuk penindasan fisik maupun mental.

Kedua, perlunya penguatan persma secara kelembagaan dan keredaksian. Persma secara kelembagaan harus memegang teguh idealisme dan kode etik jurnalistiknya. Dalam hal keredaksian, lebih ditingkatkan lagi proses kaderisasinya. Mulai *input*, proses sampai dengan *out put*-nya benar-benar diperhatikan

dan kalau perlu dilakukan pendampingan intensif. Kiranya perlu mensinergikan materi-materi jurnalistik dengan gerakan mahasiswa, agar para jurnalis kampus tidak sekadar memberitakan yang terjadi di masyarakat tetapi juga ikut berjuang bersama rakyat.

Ketiga, perlunya membangkitkan kembali gerakan kolektif pers mahasiswa. Bahwa bekerja bersama-sama akan lebih mudah jika dibandingkan bekerja sensirian. Sapu lidi akan lebih kuat dan kokoh jika digabungkan menjadi satu ikat. PPMI sebagai wadah berkumpulnya persma patut dinantikan kiprah dan sejarah barunya. Tentunya diiringi dengan kesadaran kolektif dari tiap-tiap persma yang ada.

Keempat, dipertegas lagi peran persma sebagai *watch dog*, baik birokrasi kampus maupun aparaturnegara. Dalam internal kampus, persma menjadi pengawas penyelenggara birokrasi kampus, lebih-lebih dalam pelaksanaan UU PT. Permasalahan persma bukan lagi soal pembungkaman hak bersuara atau pembredelan, akan tetapi bagaimana mendukung penyelenggaraan birokrasi kampus yang bersih dan transparan. Persma harus berani mengungkap jikalau ada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh pejabat kampus. Dalam eksternal pun, persma harus tetap menjadi pengawas pemerintah dalam menjalankan roda kenegaraan. Memberikan informasi yang objektif dan berimbang kepada masyarakat dengan mempertimbangkan kode etik jurnalistik.

Jika keempat hal itu bisa terlaksana dengan baik, bukan tidak mungkin pers mahasiswa akan mampu menggoreskan sejarah yang lebih revolusioner dibandingkan dengan pers mahasiswa terdahulu, semoga!

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tatanan neoliberalisme telah berdampak besar pada aktivitas pers mahasiswa. Agenda neoliberalisme yang mengarah pada pembentukan karakter mahasiswa yang jauh dari realitas sosial, hanya disibukkan dengan ritus akademik demi memenuhi kebutuhan pasar membuat pers mahasiswa kesulitan dalam mencari kader-kader yang berkualitas. Hal itu diperparah dengan adanya UU PT dengan segala aturan turunannya membuat pers mahasiswa ‘terpaksa’ melakukan penyesuaian-penyesuaian.

Sejarah heroik pers mahasiswa dalam melawan kolonialisme, imperialisme dan kediktatoran era orde baru seharusnya dapat diteruskan oleh generasi sekarang ini, yaitu

melawan neoliberalisme. Hal itu bisa terjadi dengan (1) membangun kesadaran kritis mahasiswa, (2) penguatan kelembagaan dan keredaksian persma, (3) membangkitkan semangat dan kesadaran kolektif pers mahasiswa, dan (4) mempertegas peran persma sebagai *watcdog*, baik birokrasi kampus maupun penyelenggara negara.

Dengan adanya ikhtiar yang dibangun atas kesadaran bersama dan berjuang dengan nama kebenaran, akan tercipta pers mahasiswa yang independen, idealis dan mampu bertahan dari gempuran neoliberalisme. *Wallahu 'alamu bi al Shawwab.*